

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DIY DAN JAWA TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh

Nama : Widiyanto
Nomor Mahasiswa : 00 312 157
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta,.....2005

Penyusun

(Widiyanto)

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DIY DAN JAWA TENGAH**

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh

Nama : Widiyanto
Nomor Mahasiswa : 00 312 157
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal.....22-3-2005.....
Dosen Pembimbing,



(Drs. Johan Arifin, Msi)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

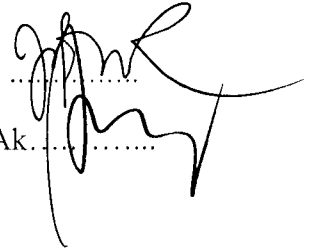
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DIY DAN JAWA TENGAH

Disusun Oleh: **WIDIYANTO**
Nomor mahasiswa: 00312157

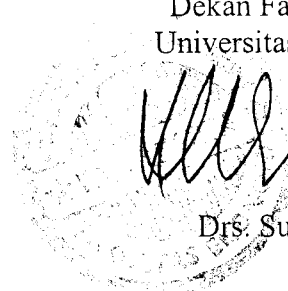
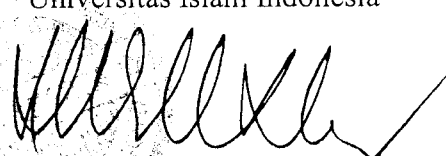
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 20 April 2005

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si

Penguji : Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

MOTTO

- **Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. (QS. Ar RA'D : 28)**
- **Face the life with calm and quiet, hard and patience**
- **I am not the best, but I always do my best in my life.**
- **Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil.
Usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- **Allah SWT, Rosulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya**
- **Bapak dan Ibu, untuk kasih dan do'anya yang selalu menyertaiku**
- **Kakak-kakak dan adik saya (mbak Miti, Mbak Sri, mas Sofi, mas Edi, dan Erna) atas dukungannya.**
- **My beloved Sri Kurnia Pusparanthi, atas kesetiaan dan kesabarannya.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Pada Pemcrintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY dan Jawa Tengah”**.

Skripsi ini berisi tentang analisis pengaruh perubahan dalam belanja pemerintah kabupaten/kota yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat dan perubahan dalam jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengambil Pemerintah kabupaten/kota diprovinsi DIY dan Jawa Tengah sebagai sampel penelitian. Penyusunan skripsi dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai hal hingga menjadi karya yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, oleh karena itu, dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H. Suwarsono, MA selaku Dekan FE UII
2. Bapak Drs. Johan Arifin, Msi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, arahan dan koreksi serta dasar-dasar berfikir dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak serta adikku yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa-doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu di Biro Pusat Statistik atas kerjasama dan data-datanya.
5. Teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kerjasamanya, “Keep Fighting guys.....!!!!!!”
6. Kepada Yuyun, Yusro’, dan Endah “thanks atas bantuannya”.
7. Teman-teman di Shadow Community (Wisnu, Adam, Bangun, Topan, Antok, Andre, Shinta, Febry, Panji, Ferry, Herlin) terimakasih atas pasedulurannya, “I Love You All”.
8. Teman-teman di PIXEL MEDIA (Mas Aris, mas jam, mas Joko, mas Sofi) makasih untuk komputernya. “Ayo mas kita cari job lagi...!!!!”
9. Teman-teman penghuni Pringgondani (Mr Black, Muso, Catoer/Iblis Bhu, Jangkung, Anggijo, Mr TT, Febry, Boim, Mr Sanni, Mr n Mrs Sumadi) Thanks for everything.
10. My Beloved Sri Kurnia Pusparanthi atas pengertian, perhatian, kesabaran, dan dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Maret 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Berita Acara Ujian.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrak.....	xv
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	4
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Sampel dan Data.....	4
1.4.2. Variabel Penelitian.....	5
1.4.3. Alat Analisis.....	5

1.5. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II Kajian Pustaka	
2.1. Belanja Daerah atau Pengeluaran Daerah (<i>Local Expenditures</i>)	7
2.1.1. Belanja Rutin	
2.1.2. Belanja Pembangunan.....	8
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	8
2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2.3.1. Pajak Daerah.....	11
2.3.2. Retribusi Daerah.....	11
2.3.3. Bagian Laba Usaha Daerah.....	13
2.3.4. Lain-lain PAD Yang Sah.....	13
2.4. Penelitian-penelitian Terdahulu Dan Penarikan Hipotesis.....	13
2.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah.....	17
2.4.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah.....	19
2.4.3. <i>Flypaper Effect</i>	21
BAB III Metode Penelitian	
3.1. Data.....	24
3.1.1. Data Umum.....	24
3.1.2. Data Khusus.....	24

3.1.3. Alat Analisis.....	31
BAB IV Analisis dan Pembahasan	
4.1. Analisis Hasil Regresi Sederhana	
(<i>Simple Regression</i>)	34
4.1.1. Regresi sederhana Pengaruh	
Dana Alokasi Umum (DAU)	
terhadap Belanja Daerah (BD).....	35
4.1.2. Regresi sederhana Pengaruh	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
terhadap Belanja Daerah (BD).).....	37
4.2. Analisis Hasil Regresi Berganda	
(<i>Multiple Regression</i>)	40
4.3. Pengujian Terhadap <i>Flypaper Effect</i>	43
BAB V Kesimpulan dan Saran	
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	48
5.3. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Dana Alokasi Umum.....	10
3.1. Ringkasan Realisasi Belanja Daerah (BD) Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi DIY dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000-2002.....	27
3.2. Ringkasan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi DIY dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000-2002.....	28
3.3. Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi DIY dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000-2002.....	30
4.1. Pengaruh DAU_t terhadap BD_t	35
4.2. Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t	36
4.3. Pengaruh PAD_t terhadap BD_t	38
4.4. Pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t	39
4.5. Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t	41
4.6. Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t	42
4.7. Perbandingan pengaruh DAU_t dengan PAD_t terhadap BD_t	44
4.8. Perbandingan pengaruh DAU_{t-1} dengan PAD_{t-1} terhadap BD_t	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Desain Penelitian.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil Perhitungan Analisis Regresi Dengan Program SPSS.....	52

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah (BD) dan untuk mengetahui perbedaan antara pengaruh DAU terhadap BD dengan pengaruh PAD terhadap BD yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan *flypaper effect*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, dengan menggunakan data-data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi DIY. Data-data yang berasal dari sample yaitu sejumlah 40 pemerintah kabupaten/kota yang ada diprovinsi DIY dan Jawa Tengah tersebut kemudian diolah dengan regresi sederhana (*simple regression*) baik dengan maupun tanpa *lag* untuk mendeteksi pengaruh DAU dan PAD tahun t terhadap BD_t secara terpisah dan untuk mendeteksi pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t sedangkan regresi berganda (*multiple regression*) digunakan untuk melihat pengaruh DAU dan PAD terhadap BD secara bersamaan, seperti halnya pada regresi sederhana, pada regresi berganda juga diuji dengan maupun tanpa *lag*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU dan PAD baik secara terpisah maupun secara serempak, baik dengan atau tanpa *lag* menunjukkan bahwa DAU dan PAD benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD). Sedangkan saat masing-masing hasil regresi dibandingkan, hasilnya menunjukkan indikasi yang menyatakan keberadaan *flypaper effect*, hal ini dapat dilihat dari nilai *t-statistic*, *F-statistic*, R , R^2 , dan *adjusted-R²* DAU yang lebih besar daripada PAD, yang berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah kepada pemerintah pusat masih tinggi dan belum memiliki kesiapan yang cukup untuk melaksanakan Otonomi Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 memberikan dampak bagi pemerintahan Indonesia, peningkatan kemiskinan yang luar biasa merupakan dampak negatif yang timbul dari peristiwa tersebut. Namun disisi lain, peristiwa tersebut juga memberikan “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Dampak yang dapat kita rasakan dari kejadian tersebut adalah munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral dari reformasi total tersebut adalah adanya tuntutan untuk mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Salah satu unsur dari reformasi total tersebut adalah tuntutan untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo, 2002).

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Seperti dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Budiono (dalam Sidik et al, 2002,V), tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang menjadi landasan Otonomi Daerah tersebut disebutkan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Jadi dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah memiliki beberapa sumber penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pada dasarnya PAD dan transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan merupakan sumber dana terbesar yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan dan biaya operasional sehari-hari Pemda. Namun pada prakteknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana Utama yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya, yang oleh Pemda dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam sidik et al, 2002).

Di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60 % untuk pemerintah daerah (Fischer, 1996), khusus dinegara-negara bagian Wisconsin di AS, sebesar 47% pendapatan Pemda

berasal dari transfer Pemerintah pusat (Deller et al, 2002). Di Indonesia, pada dekade 1990-an, persentase ini mencapai 72% pengeluaran provinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota. Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko (Abdullah dan Halim, 2003).

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa transfer dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah sangatlah besar. Mengingat tingginya jumlah transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah maka ada kemungkinan besar bahwa jika terjadi perubahan dalam transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka akan terjadi perubahan pada kemampuan daerah dalam hal keuangan yang nantinya akan berimbas pada jumlah belanja yang mampu dikeluarkan untuk keperluan daerah. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY Dan Jawa Tengah”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perubahan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara terpisah maupun secara serentak akan memberikan pengaruh terhadap besarnya belanja Pemerintah Daerah?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh perubahan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap besarnya belanja Pemerintah Daerah Baik secara terpisah maupun secara serentak.

1.3.2. Manfaat penelitian

- a. Bagi para aparat daerah dan masyarakat, penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Belanja Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik.
- b. Bagi peneliti, Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan sarjana Strata 1 (S-1) Universitas Islam Indonesia.

1.4. METODE PENELITIAN

1.4.1. Sampel dan Data

Karena penelitian ini merupakan studi kasus yang mengambil pemerintah kabupaten/kota diprovinsi DIY dan Jawa Tengah maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi DIY dan Jawa Tengah,

yang terdiri dari 5 pemerintah kabupaten/kota yaitu 4 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota untuk provinsi DIY, dan 29 pemerintah kabupaten serta 6 pemerintah kota untuk Provinsi Jawa Tengah. Sementara data yang dianalisis adalah data yang bersumber dari laporan APBD dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut, yaitu data berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD), yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi DIY, dan sumber-sumber lain seperti internet. Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2000 sampai 2002.

1.4.2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelian ini adalah DAU, PAD, dan Belanja Daerah (BD) yang pengertian dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan secara lebih mendalam pada tinjauan pustaka.

1.4.3. Alat Analisis

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*) yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran pemerintah (Hoover & Sheffrin, 1992). Regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap Belanja Daerah secara terpisah, sedangkan regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel tersebut secara serentak. Data diolah dengan bantuan *softwear* komputer yaitu program SPSS.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang penjabaran teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari sampel dan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Membahas tentang uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan hasil yang diperoleh.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas lebih mendalam mengenai teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang menjelaskan pengertian Belanja Daerah (BD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta teori-teori yang menjelaskan hubungan dari ketiga variabel tersebut berupa hasil penemuan terdahulu yang menjadi landasan teori dan sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti.

2.1. Belanja daerah atau Pengeluaran Daerah (*Local Expenditures*)

Menurut Kepmendagri No. 29/2002 disebutkan bahwa Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah provinsi/Pemprov, dan Pemerintah pusat/pempus). Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan.

2.1.1. Belanja Rutin

Belanja rutin merupakan belanja yang keluarannya tidak berupa fisik dan terjadi berulang-ulang sepanjang waktu atau periode. Dalam Keputusan Menteri

Keuangan No. 157/KMK.07/2001 disebutkan bahwa Belanja Rutin dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja perjalanan dinas
- d. Belanja bunga pinjaman dan
- e. Belanja lain-lain

2.1.2. Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan merupakan belanja yang menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan ini akhirnya akan menghasilkan kapital publik (menurut Kepmendagri no.29/2002 disajikan dalam neraca) dikutip dari Abdullah dan Halim (2003). Hasil yang dapat dilihat dari adanya belanja pembangunan adalah pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan hasil lain yang berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik.

2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Transfer dari Pemerintah Pusat mempunyai arti yang

penting bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan dari transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU. No. 25 /1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK , selain bagi hasil (*revenue sharing*) (Abdullah dan Halim, 2003).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, selain bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan. DAU diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota dengan formula dan faktor lain-lain yang ditetapkan oleh kepres. Dalam UU No. 25/1999 disebutkan bahwa DAU diambilkan dari APBN untuk daerah adalah 25% dari penerimaan dalam negeri. Dana ini dialokasikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan proporsi masing-masing 10% dan 90%. Porsi yang didapatkan suatu provinsi merupakan bobot provinsi tersebut dibandingkan dengan bobot seluruh provinsi di Indonesia. Porsi yang didapatkan sebuah kabupaten/kota didasarkan pada bobot kabupaten/kota tersebut dibandingkan dengan bobot seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bobot suatu daerah ditentukan oleh (1) kebutuhan wilayah daerah, yang meliputi variable-variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua adalah (2) potensi ekonomi daerah, yang dicerminkan

oleh potensi penerimaan daerah , meliputi variable-variabel seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto. Formulasi untuk menghitung besarnya DAU dapat dilihat dalam table 2.1

TABEL 2.1
DANA ALOKASI UMUM

Besarnya DAU	DAU untuk provinsi	DAU untuk kabupaten/kota
25% x PDN APBN	10% X 25% PDN APBN	90% X 25% X PDN APBN
$\text{DAU suatu provinsi} = \frac{\text{Bobot provinsi yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU Untuk provinsi}$		
$\text{DAU suatu kabupaten} = \frac{\text{Bobot kabupaten/kota yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh kabupaten/kota di Indonesia}} \times \text{DAU untuk kabupaten/kota}$		

Sumber UU No. 25 Tahun 1999

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang (Mamesah,1995).

2.3.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pembangunan daerah.

Pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Menurut aturan baru, pemerintah kabupaten/kota dapat menambah jenis pajak lain diluar yang telah ditentukan dalam UU No. 34 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah, ketentuan baru tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa yang akan datang yang menyebabkan perkembangan potensi pajak.

2.3.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut UU No 34 Tahun 2000

dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat dikelompokkan dalam :

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti retribusi atas pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain.
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, seperti retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat pelelangan, tempat khusus parkir dan lain-lain.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Misalnya, retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan, izin trayek, izin gangguan, dan lain-lain.

2.3.3. Bagian Laba Usaha Daerah

Jenis bagian pendapatan ini antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Undang-undang mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada anggaran daerah, atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah, yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah.

2.3.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Yang termasuk dalam rincian penerimaan lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah), dan lain-lain.

2.4. Penelitian-penelitian Terdahulu Dan Penarikan Hipotesis

Bagaimana Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya merupakan pertanyaan yang menarik sejak lama. ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku Pemda dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dana yang berasal dari sumber yang ada di atasnya maupun dana yang berasal dari pendapatannya sendiri. Pemerintah Daerah bisa merespon transfer dari pusat baik secara simetris maupun tidak

simetris (Gamkhar & Oates, 1996). Beberapa peneliti menemukan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan sendiri, artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pusat, maka disebut *flypaper effect* (Oates, 1999)

Analisis Zou (1994) berhasil mengidentifikasi beberapa konsekuensi dari perubahan *grants* atau transfer yakni: (1) kenaikan permanen dalam *matching grants* akan mempercepat investasi publik, memperbesar kapital jangka panjang, dan memperbesar belanja rutin dalam jangka panjang; (2) kenaikan permanen dalam *matching grants* untuk investasi dan belanja rutin mungkin akan mempercepat atau memperlambat investasi; (3) kenaikan temporer atas *grants* sekarang (apapun bentuk *grants*) akan mendorong investasi publik; (4) kenaikan temporer *non-matching grants* pada masa yang akan datang akan mengurangi investasi sekarang dan meningkatkan belanja rutin sekarang; (5) kenaikan temporer *matching grants* pada masa yang akan datang untuk belanja rutin akan mengurangi investasi publik sekarang dan memperbesar belanja rutin sekarang; (6) kenaikan sementara dalam *matching grants* pada masa yang akan datang untuk investasi mempunyai dampak yang ambigu terhadap investasi publik. Esensi dari temuan-temuan tersebut adalah adanya perubahan dalam total belanja daerah (rutin dan pembangunan) sebagai akibat dari perubahan dalam *grants* atau transfer dari Pemerintah Pusat (Abdullah dan Halim, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Haryadi (2002) tentang pengaruh *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang mengambil pemerintah kabupaten/kota dipropinsi Jawa Timur sebagai sampel penelitian, hasil penelitian menyebutkan bahwa *fiscal stress* atau tekanan keuangan yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. *Fiscal stress* dalam hal ini merupakan kondisi dimana pemerintah kabupaten/kota mengalami tekanan keuangan yang terjadi karena adanya krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kestabilan alokasi dana dari APBN ke APBD dan adanya UU No. 18/1997 tentang pembatasan pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah yang menyebabkan penurunan sumber pendapatan daerah, sedangkan kinerja keuangan disini meliputi beberapa unsur yaitu kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai APBDnya, kemampuan mobilisasi dan desentralisasi fiskal. Hal senada juga dinyatakan oleh Abdul Halim (2001) yang melakukan analisis deskriptif pengaruh *fiscal stress* pada APBD pemerintah kabupaten/kota dipropinsi Jawa Tengah, hasil analisisnya menunjukkan bahwa *fiscal stress* benar-benar berpengaruh terhadap APBD Pemerintah Daerah diprovinsi tersebut, hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa bukti pergeseran (kenaikan/penurunan) dari komponen-komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Hasil dari kedua penelitian tersebut mendukung keberadaan hipotesis pendapatan-belanja, dimana saat terjadi krisis ekonomi dan pembatasan pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah yang menyebabkan adanya penurunan pada sumber penerimaan daerah

maka kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi APBDnya juga akan menurun yang berarti juga terjadi penurunan pada tingkat Belanja Daerah.

Di Indonesia, penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah juga pernah dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim yang mengambil seluruh pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali sebagai sample penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, baik tanpa *lag* maupun dengan *lag*. Ketika tidak digunakan *lag*, pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih kuat daripada pengaruh DAU, tetapi ketika digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD. Ketika kedua faktor tersebut (DAU dan PAD) diregres secara serentak dengan Belanja Daerah, pengaruh keduanya juga signifikan, baik menggunakan *lag* maupun tanpa *lag*. Esensi dari hasil penelitian diatas tersebut adalah adanya pengaruh yang disebabkan oleh perubahan besarnya DAU dan PAD yang diterima oleh Pemda terhadap besarnya Belanja yang dikeluarkan oleh Pemda dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan biaya operasional sehari-hari.

Peningkatan-peningkatan yang terjadi dalam DAU, PAD dan Belanja Daerah dapat dilihat dalam Statistik Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota Seluruh Indonesia yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data yang ada pada BPS tersebut dapat diketahui bahwa nilai DAU terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Rp 21.631.127.161.000,- pada tahun 2000 menjadi Rp

54.862.250.495.000,- pada tahun 2001 dan Rp 60.155.407.358.000,- pada tahun 2002. Begitu juga dengan nilai PAD yang terus meningkat dari tahun 2000 sejumlah Rp 2.689.830.437.000,- menjadi Rp 5.320.915.735.000,- pada tahun 2001 dan Rp 5.784.379.866.000,- pada tahun 2002, sejalan dengan peningkatan pada dua sumber utama penerimaan daerah tersebut juga terjadi peningkatan pada jumlah belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 27.863.865.488.000,- pada tahun 2000, naik menjadi Rp 72.287.059.917.000,- pada tahun 2001 dan Rp 87.052.584.509.000,- pada tahun 2002. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi pada kedua sumber pendapatan tersebut benar-benar memberikan dampak pada peningkatan Belanja Pemerintah Daerah.

2.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Banyak penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah. Sebagian studi mengatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja sementara sebagian lain mengatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Azis, 2000, Doi, 1998). Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah. Studi Legrenzi dan Milas (2001) dengan menggunakan sample *Municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang, transfer dari Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menyebutkan bahwa variable-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer

yang diterima dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan respon yang *non-linear* dan *asymmetric*.

Ghamkar dan Oates (1996) menganalisis respon Pemda terhadap perubahan transfer dari Pemerintah Federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991, mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Studi Hiltz dan Eakin (1994) menganalisis model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selama kurun waktu 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan dengan suatu model, dimana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumber daya secara permanen bukan ketersediaan yang sifatnya temporer, mereka menemukan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources* (Abdullah dan Halim, 2003).

Berdasarkan konsep dan temuan diatas maka ditarik hipotesis yang pertama:

H_{1a} : Dana Alokasi Umum (DAU)_t berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah (BD)_t

Sering terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan besarnya realisasi yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya yakin bahwa jumlah yang telah ditetapkan tersebut akan diterima dan dapat digunakan dengan bebas oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Memen (2002) menunjukkan ketidakpuasan Pemerintah Daerah terhadap rumusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat terlihat misalnya, Pemerintah Jember yang melakukan protes karena kecilnya DAU yang diterima yaitu sebesar Rp 300 miliar, apabila dibandingkan dengan belanja pegawai yang mencapai Rp 275 miliar, jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil. Kasus lain yang terjadi adalah protes yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bekasi yang melakukan protes kepada Depdagri dan Otda karena mereka hanya menerima DAU sebesar RP 184,7 miliar, merupakan jumlah yang sangat jauh dari perkiraan semula yang jumlahnya diharapkan mencapai Rp 250 – Rp 800 miliar, dengan adanya berbagai kasus tersebut maka keputusan Pemerintah Daerah tentang Belanja Daerahnya sering menggunakan dasar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tahun sebelumnya.

Studi Holtz dan Eakin (1995) menemukan bahwa *grants* tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun berjalan, namun belanja tahun lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan tahun berjalan. Hipotesis untuk melihat pengaruh DAU tahun lalu terhadap (DAU_{t-1}) Belanja Daerah tahun berjalan (BD_t) adalah

H_{1b} : Dana Alokasi Umum $(DAU)_{t-1}$ berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah $(BD)_t$.

2.4.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Studi terhadap pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Azis et al, 2000,

Blackley, 1986, Joulfaian & Mokeerjee, 1990) Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran pengeluaran daerah disebut dengan *tax-spend hypothesis* (Azis et al, 2000, Doi, 1998, von Furstenberg et al, 1985). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah akan disesuaikan dengan perubahan penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan dalam pendapatan akan terjadi sebelum perubahan dalam pengeluaran. Dikutip dari Abdullah dan Halim (2003).

Dalam literturnya yang berjudul “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”, Dr Machfud Sidik, Msc menyebutkan bahwa daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sehingga peningkatan sumber-sumber PAD perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada besarnya PAD suatu daerah akan menyebabkan perubahan pada kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, jika hal ini dirujuk dengan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah yang dinyatakan oleh mantan Menteri Keuangan Budiono bahwa tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dengan adanya peningkatan keuangan daerah yang disebabkan oleh peningkatan PAD akan memberikan tuntutan kepada Pemda

untuk meningkatkan pencapaian standar minimum pelayanan publik, yang berarti secara otomatis jumlah belanja yang harus dikeluarkan pun akan meningkat. Hal ini mendukung adanya hipotesis pendapatan-belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng (1999) bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk Pemda di beberapa Negara Amerika Latin, hal senada juga dinyatakan oleh Friedman (1978) yang menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hoover dan Sheffrin (1992) yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam rentang waktu berbeda, untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*) Karena pajak merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah maka hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah adalah :

H_{2a} : Pendapatan Asli Daerah (PAD)_t berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)_t

H_{2b} : Pendapatan Asli Daerah (PAD)_{t-1} berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)_t

2.4.3. Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah

transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Studi Anderson (2002) dalam literaturinya tentang perubahan sistem *grants* terhadap pengeluaran Pemda di Swedia menemukan bahwa perubahan dalam *non-matching grants* akan menyebabkan kenaikan pengeluaran Pemda, berbeda dengan akibat dari kenaikan dalam pendapatan yang bersumber dari pajak. Kenaikan pajak tinggi akan menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Menurut Anderson, efek dari *non-matching grants* lebih besar dibanding dengan *matching grants* dan efek ini tergantung dari penurunan relative atas *non-matching grants* untuk beberapa periode. Hasil ini mendukung hipotesis *flypaper effect*.

Studi Aaberge dan Langorgen (1997) yang menganalisis perilaku fiskal dan belanja Pemerintah Daerah dengan *simultaneous setting* dan menemukan adanya *flypaper effect* dalam respon daerah terhadap perubahan pendapatan. Bagi Pemerintah Daerah yang menjadi masalah dalam pembuatan keputusan alokasi sumberdaya adalah pemilihan kombinasi yang terbaik antara pajak daerah, surplus dan defisit anggaran, dan *output* dalam pelayanan publik, yang dibatasi oleh “aturan” bahwa pengeluaran daerah plus surplus anggaran tidak melebihi *grants* dari Pemerintah Pusat plus pajak daerah. Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan dampak antara *grants* dan Pendapatan (pajak) Daerah terhadap perilaku fiskal dan belanja daerah.

Penelitian Legrensi dan Milas (2001) juga memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel *Municipalities* di Italia. Mereka menyatakan bahwa *local governments consistently increase their*

expenditure more with respect to increase in State transfer rather than to increase in own revenues. Zampelli (1986) memberikan bukti senada untuk pemerintah kota di Amerika Serikat, yakni terjadinya *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap *unconditional grants*. Karena itu, *flypaper effect* dipandang sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan (dibelanjakan dengan cara yang sama pula) (Hines & Thaler, 1995). Dari uraian di atas maka ditarik hipotesis yang ketiga :

H_{3a} : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)_t terhadap Belanja Daerah (BD)_t lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)_t terhadap Belanja Daerah (BD)_t.

H_{3b} : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)_{t-1} terhadap Belanja Daerah (BD)_t lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)_{t-1} terhadap Belanja Daerah (BD)_t.

Studi ini menganalisis bagaimana transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah dengan mengambil pemerintah kabupaten/kota diprovinsi DIY dan Jawa Tengah sebagai obyek penelitian, untuk mengetahui apakah hipotesis pendapatan-belanja berlaku di kedua provinsi ini, dan untuk mendeteksi keberadaan *flypaper effect*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. DATA

3.1.1. Data Umum

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah merupakan dua dari 5 provinsi yang terdapat di pulau Jawa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 5 pemerintah kabupaten/kota, yaitu 4 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota. 4 pemerintah kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kotamadya Yogyakarta yang merupakan satu-satunya pemerintahan kota di provinsi ini. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 pemerintah kabupaten/kota, yang terbagi menjadi 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota.

3.1.2. Data khusus

Data khusus yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi DIY dan Jawa Tengah yang berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada.

a. Belanja Daerah (BD)

Belanja Daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/Pemprov, dan Pemerintah Pusat/pempus). Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan.

1. Belanja Rutin

Pada umumnya ada sembilan unsur pengeluaran yang menjadi bagian dari Belanja Rutin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah diprovinsi DIY dan Jawa Tengah setiap periodenya., kesembilan unsur tersebut adalah

- a). Belanja Pegawai/*Personnel Current Expenditure*
- b). Belanja Barang/*Material Current Expenditure*
- c). Biaya Pemeliharaan/*Repair & Maintenance Expenditure*
- d). Belanja Perjalanan Dinas/*Official Travel Expenditure*
- e). Belanja Lain-lain/*Other Current Expenditure*
- f). Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga/*Debt and Interest Repayment*
- g). Bantuan Keuangan/*Financial Aids*
- h). Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain/*Other Current Expenditure*

i). Pengeluaran Tidak Tersangka/*Unpredicted Current Expenditure*

2. Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan merupakan belanja yang tidak bersifat rutin atau terus menerus. Pada pemerintah Daerah diprovinsi DIY dan Jawa Tengah pada umumnya ada 21 poin pengeluaran pembangunan dalam setiap periode anggaran yang meliputi anggaran dalam berbagai aspek, antara lain :

- a). Industri/*Industry*
- b). Pertanian dan Kehutanan/*Agriculture and Forestry*
- c). Tenaga Kerja/*Manpower*
- d). Agama/*Religion*
- e). Hukum/*Law*
- f). Keamanan dan Ketertiban Umum/*Security and Public Order*
- g). Dan aspek-aspek yang lain

Belanja Daerah merupakan total pengeluaran pemerintah Daerah yang berupa Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Ringkasan Belanja Daerah dari masing-masing Pemda di DIY dan Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
RINGKASAN REALISASI BELANJA DAERAH (BD) PEMDA
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI DIY DAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN
2000-2002
(000 Rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002
Kulon Progo	64 764 435	189 519 234	251 460 935
Bantul	91 766 940	258 897 957	340 608 129
Gunung Kidul	94 188 088	204 217 829	240 216 544
Sleman	118 532 973	293 229 919	345 795 653
Kota Yogyakarta	85 292 598	192 413 961	242 199 603
Cilacap	155 838 063	352 554 414	437 554 414
Banyumas	145 009 263	342 320 787	366 052 737
Purbalingga	80 413 671	235 681 403	258 480 331
Banjarnegara	89 124 200	235 681 403	258 480 331
Kebumen	105 555 341	238 865 453	262 040 375
Purworejo	97 981 826	260 667 772	287 188 748
Wonosobo	70 069 050	177 333 916	243 832 350
Magelang	103 136 024	264 481 206	361 898 948
Boyolali	98 814 022	242 887 418	288 274 514
Klaten	121 245 721	320 287 038	375 244 563
Sukoharjo	80 268 360	205 601 789	251 590 465
Wonogiri	105 102 425	257 368 554	293 359 230
Karanganyar	79 496 742	238 717 246	266 943 816
Sragen	91 317 317	250 634 842	281 407 403
Grobogan	98 558 062	285 514 111	312 334 133
Blora	90 797 217	258 148 042	342 222 360
Rembang	65 067 558	180 771 131	208 354 532
Pati	103 818 497	282 090 785	315 030 844
Kudus	72 854 756	200 307 728	223 840 040
Jepara	86 863 106	257 532 589	364 410 000
Demak	73 616 842	176 225 241	329 084 016
Semarang	83 603 383	230 343 795	272 941 005
Temanggung	69 186 166	216 189 011	258 667 176
Kendal	84 673 127	265 345 161	390 609 715
Batang	62 163 488	186 301 595	236 927 113
Pekalongan	71 571 675	233 059 187	241 161 119
Pemalang	93 490 674	241 889 345	285 549 404
Tegal	120 201 705	274 392 312	343 401 318
Brebes	119 475 896	325 035 162	362 586 901

Kota Magelang	32 866 115	105 759 818	133 797 887
Kota Surakarta	101 315 413	209 337 376	251 994 832
Kota Salatiga	29 716 256	73 970 674	125 161 854
Kota Semarang	203 985 171	414 397 029	466 918 999
Kota Pekalongan	39 905 151	96 801 441	130 573 436
Kota Tegal	38 432 360	122 265 285	246 692 202

Sumber: BPS DIY

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, selain bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan. DAU diterima oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan formula dan faktor lain-lain yang ditetapkan oleh Kepres.

Besarnya distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah diprovinsi DIY dan Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.2
RINGKASAN REALISASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) PEMDA
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI DIY DAN JAWATENGAH
TAHUN ANGGARAN
2000-2002
(000 Rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002
Kulon Progo	54 320 563	191 320 563	207 900 000
Bantul	74 970 884	180 450 612	258 680 000
Gunung Kidul	62 797 726	157 630 914	215 490 000
Sleman	92 957 647	205 430 376	255 350 000
Kota Yogyakarta	48 257 959	113 437 221	169 190 000
Cilacap	116 223 387	315 850 704	332 110 000
Banyumas	117 694 015	293 426 137	319 657 756

Purbalingga	64 523 135	224 657 631	233 840 000
Banjarmegara	75 874 477	202 084 631	211 199 000
Kebumen	95 809 739	269 691 412	283 640 000
Purworejo	81 920 738	200 412 628	225 780 000
Wonosobo	57 812 941	207 242 117	214 770 000
Magelang	86 421 619	251 785 340	269 800 000
Boyolali	78 955 095	212 748 562	249 260 000
Klaten	107 593 286	271 735 512	329 020 000
Sukoharjo	67 345 503	154 866 421	205 280 000
Wonogiri	90 519 596	228 750 011	252 160 000
Karanganyar	63 711 064	199 130 493	221 140 000
Sragen	76 572 920	215 887 278	238 900 000
Grobogan	84 809 450	244 117 428	266 490 000
Blora	73 037 335	285 249 666	285 250 000
Rembang	51 792 373	151 525 701	172 240 000
Pati	83 376 139	247 194 411	266 500 000
Kudus	58 489 167	175 589 725	184 830 000
Jepara	69 063 229	233 777 836	212 930 000
Demak	61 591 756	148 362 833	196 740 000
Semarang	66 398 427	187 041 468	215 290 000
Temanggung	57 518 233	181 604 823	196 610 000
Kendal	64 704 695	286 806 427	286 810 000
Batang	52 981 727	211 883 526	211 880 000
Pekalongan	57 231 789	205 220 000	191 370 000
Pemalang	77 096 894	223 787 952	248 890 000
Tegal	100 183 595	301 504 118	280 220 000
Brebes	98 205 965	272 829 565	302 520 000
Kota Magelang	22 109 784	103 011 674	106 050 000
Kota Surakarta	68 735 372	111 630 284	178 390 000
Kota Salatiga	22 682 336	77 107 926	97 410 000
Kota Semarang	130 357 310	254 262 363	266 950 000
Kota Pekalongan	31 913 408	79 367 111	99 270 000
Kota Tegal	26 542 535	194 484 035	178 270 000

Sumber: BPS DIY

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah

Pemda-pemda diprovinsi DIY dan Jawa Tengah berasal dari beberapa sumber yaitu :

- a). Pajak Daerah/*Local Taxes Receipt*
- b). Retribusi Daerah/*Repayments Receipt*
- c). Retribusi Jasa Umum/*Repayments of Public Service*
- d). Retribusi Jasa Usaha/*Retr. of Commercial Profit*
- e). Retribusi Perijinan Tertentu/*Retr. of Spesific Permit*
- f). Bagian Laba Usaha Daerah/*Local Gov. Corporate Profit*
- g). Penerimaan PAD Lainnya/*Other Local Gov. Orig. Receipt*

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah seprovinsi DIY dan Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.3
RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMDA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI DIY DAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN
2000-2002
(000 Rupiah)

Kabupaten/Kota	2000	2001	2002
Kulon Progo	6 726 479	10 132 946	10 165 790
Bantul	7 074 418	14 073 123	20 109 293
Gunung Kidul	5 719 379	8 852 287	10 258 188
Sleman	17 889 885	29 571 153	34 001 263
Kota Yogyakarta	22 452 952	40 352 593	36 883 034
Cilacap	19 278 951	32 112 950	35 527 492
Banyumas	16 663 495	30 447 270	24 907 017
Purbalingga	6 259 256	15 702 979	14 277 731

Banjarnegara	4 769 553	11 522 077	12 136 744
Kebumen	6 310 219	14 216 166	13 088 070
Purworejo	8 787 034	15 088 382	15 611 382
Wonosobo	6 948 063	14 992 753	12 205 000
Magelang	11 946 613	23 737 345	29 445 623
Boyolali	11 369 439	17 675 167	17 195 302
Klaten	6 598 582	13 832 059	15 381 840
Sukoharjo	6 705 281	14 791 345	15 290 702
Wonogiri	10 366 132	14 224 168	19 624 111
Karanganyar	9 129 011	16 550 716	17 330 154
Sragen	8 876 265	15 884 596	18 542 432
Grobogan	8 016 315	15 884 596	18 542 432
Blora	8 498 133	16 418 414	15 717 823
Rembang	6 400 286	9 450 247	11 075 810
Pati	12 732 617	25 022 518	23 411 773
Kudus	11 141 396	22 124 964	24 515 715
Jepara	9 970 486	20 099 328	19 790 000
Demak	5 012 975	11 117 808	11 867 298
Semarang	11 002 441	18 923 277	25 095 397
Temanggung	5 179 897	11 194 676	16 035 910
Kendal	11 446 454	21 717 223	24 250 587
Batang	5 703 978	14 368 778	12 679 000
Pekalongan	9 179 822	12 734 779	15 684 842
Pemalang	7 049 449	19 452 235	16 074 020
Tegal	10 039 245	18 599 227	22 258 930
Brebes	10 504 914	14 520 906	20 120 240
Kota Magelang	7 373 214	12 311 343	12 896 020
Kota Surakarta	21 919 678	35 852 034	44 037 438
Kota Salatiga	5 435 737	10 501 682	10 724 590
Kota Seamarang	48 741 407	85 524 469	106 738 464
Kota Pekalongan	3 428 040	7 327 353	8 183 269
Kota Tegal	6 765 212	17 576 787	24 014 001

Sumber: BPS DIY

3.1.3 Alat Analisis

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*) karena analisis regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan/pajak terhadap pengeluaran pemerintah (Hoover dan Sheffrin, 1992). Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk melihat pengaruh jumlah DAU dan PAD

terhadap Belanja Daerah (BD) secara *cross-section* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_i = a + bX_i + e$$

Dimana :

Y_i : Jumlah belanja atau perubahan dalam jumlah belanja (BD_t)

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

X_i : Jumlah DAU_t (DAU_{t-1}) atau PAD_t (PAD_{t-1})

e : *Error term*

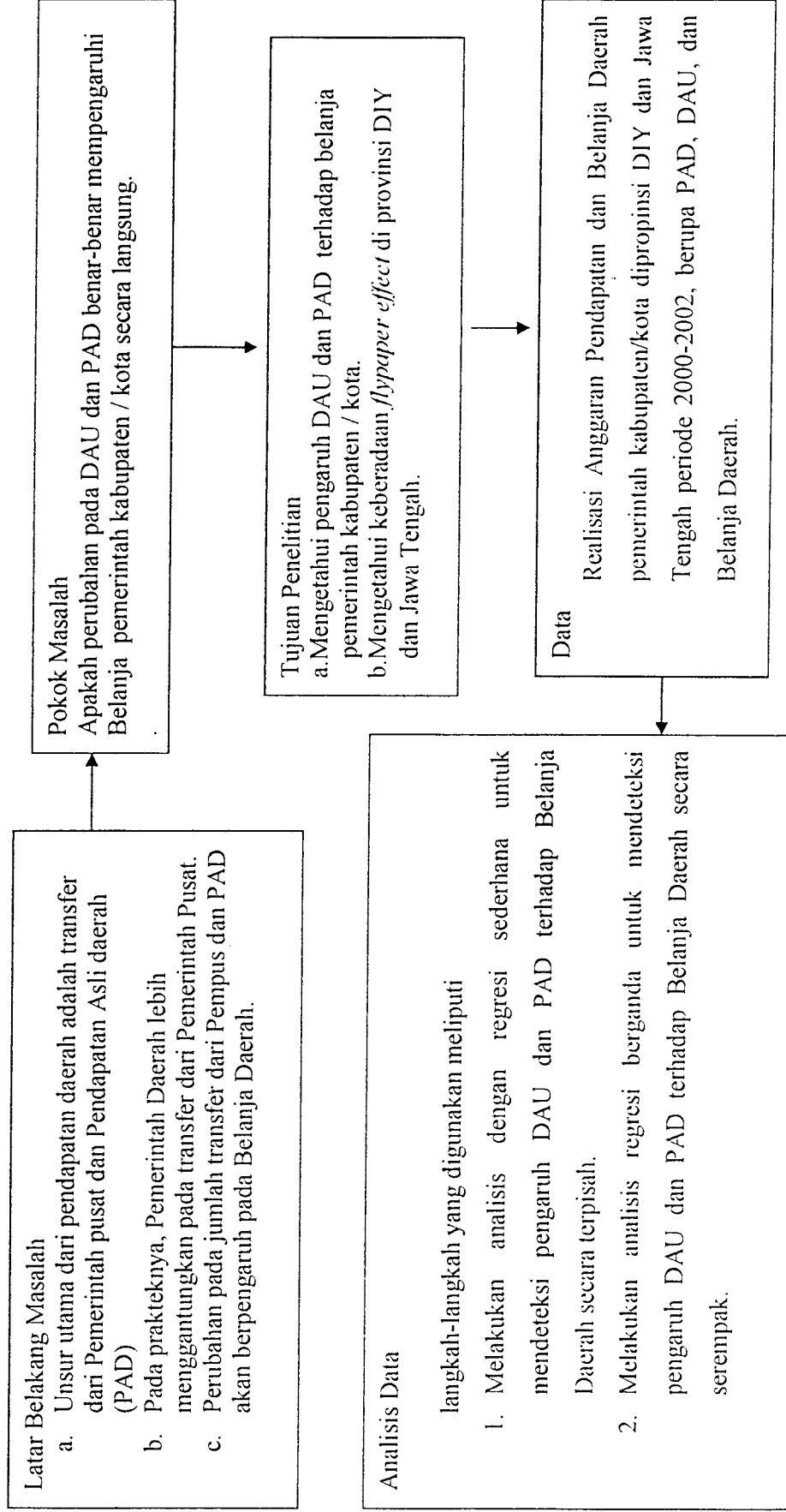
Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pendapatan daerah tersebut secara serempak mempengaruhi Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = a + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + e$$

Dimana variabel yang lain tetap sementara X_{1i} adalah DAU_t (DAU_{t-1}) dan X_{2i} adalah PAD_t (PAD_{t-1}).

GAMBAR 3.1.

DESAIN PENELITIAN



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab II telah diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan analisis hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah (BD) yang didasarkan pada teori-teori yang terkait dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pada dasarnya menyatakan bahwa memang ada hubungan antara ketiga variabel tersebut. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis data untuk melihat dan membuktikan ada tidaknya pengaruh perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) dengan menggunakan data-data dan alat analisis yang telah dijabarkan pada bab III.

4.1. Analisis Hasil Regresi Sederhana (*Simple Regression*)

Pengujian untuk melihat pengaruh DAU dan PAD secara terpisah terhadap BD_t dilakukan dengan dua model yaitu regresi tanpa *lag* dan regresi dengan *lag* 1 tahun. Regresi tanpa *lag* digunakan untuk melihat pengaruh DAU_t (DAU tahun t) dan PAD_t (PAD tahun t) terhadap BD_t (BD tahun t) secara terpisah, sedangkan regresi dengan *lag* 1 tahun digunakan untuk melihat pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t secara terpisah.

4.1.1. Regresi sederhana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD).

a. Regresi sederhana tanpa lag

Hasil analisis regresi sederhana tanpa lag untuk menguji hubungan antara DAU_t terhadap BD_t dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1

Pengaruh DAU_t terhadap BD_t

$BD_{2000} = 39263,915 + 1,259$ DAU_{2000}	$BD_{2001} = 45776537,2 + 0,915$ DAU_{2001}	$BD_{2002} = 27810083,6 + 1,136$ DAU_{2002}
Sig = 0,000 t-statistic = 19,758	Sig = 0,000 t-statistic = 8,205	Sig = 0,000 t-statistic = 10,421
F-statistic = 390,395	F-statistic = 67,327	F-statistic = 108,587
R (R^2) = 0,955 (0,912)	R (R^2) = 0,800 (0,64)	R (R^2) = 0,561 (0,741)
Adjusted- R^2 = 0,909	Adjusted- R^2 = 0,630	Adjusted- R^2 = 0,734

Dari nilai *t-statistic* untuk ketiga regresi tersebut terlihat bahwa DAU_t berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD_t) hal ini ditunjukkan dengan nilai *t-statistic* sebesar 19,758 untuk tahun 2000, 8,205 untuk tahun 2001 dan 10,421 untuk tahun 2002. Nilai *R* yang positif yang menunjukkan hubungan yang positif diantara kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan DAU ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu 91,2% untuk tahun 2000, 64% untuk tahun 2001 dan 74,1% untuk tahun 2002. Hal ini bermakna bahwa jika terjadi kenaikan DAU sebesar 10% maka BD akan naik sebesar 9,12% untuk tahun 2000, 6,4% untuk tahun 2001 dan 7,41% untuk tahun 2002. Dengan demikian, hipotesis pertama dari hipotesis yang pertama (H_{1a}) yang menyatakan bahwa DAU_t berpengaruh positif terhadap BD_t tidak dapat ditolak, hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al

(1994), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003).

b. Regresi sederhana dengan lag 1 tahun

Untuk analisis regresi sederhana dengan menggunakan lag 1 tahun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perubahan DAU_{t-1} terhadap BD_t , hasil analisisnya dapat dilihat dalam tabel berikut 4.2.

TABEL 4.2

Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t

$BD_{2001} = 46832269,1 + 2,619 DAU_{2000}$	$BD_{2002} = 80743812 + 0,999 DAU_{2001}$
Sig = 0,000 t-statistic = 18,010	Sig = 0,000 t-statistic = 8,220
F-statistic = 324,373	F-statistic = 67,566
R (R^2) = 0,946 (0,894)	R (R^2) = 0,800 (0,64)
Adjusted- R^2 = 0892	Adjusted- R^2 = 0,630

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai *t-statistic* untuk regresi sederhana dengan lag 1 tahun adalah 18,010 untuk regresi sederhana antara DAU tahun 2000 terhadap BD tahun 2001 dan 8,220 untuk regresi antara DAU tahun 2001 terhadap BD tahun 2002. Nilai *R* yang positif yang menunjukkan hubungan yang positif diantara kedua variabel hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara DAU_{t-1} terhadap BD_t . Adapun besarnya pengaruh perubahan BD_t yang disebabkan oleh perubahan DAU_{t-1} ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu 89,4% untuk tahun 2001 dan 64% untuk tahun 2002, hal ini bermakna bahwa jika terjadi kenaikan DAU sebesar 10% maka BD akan naik sebesar 8,94% untuk tahun 2001 dan 6,4% untuk tahun 2002, dengan demikian hipotesis kedua dari hipotesis yang pertama (H_{1b}) yang menyatakan bahwa DAU_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t

tidak dapat ditolak, artinya jika ada peningkatan dalam jumlah DAU_{t-1} maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja (BD_t) yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1994), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003).

Dari kedua regresi sederhana tersebut terlihat bahwa untuk regresi tanpa *lag* pengaruh DAU terhadap BD sempat mengalami penurunan pada tahun 2001 dan kemudian naik lagi pada tahun 2002, sedangkan untuk regresi dengan *lag* pengaruh DAU terhadap BD mengalami penurunan, hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya pengaruh DAU terhadap BD.

4.1.2. Regresi sederhana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD).

a. Regresi sederhana tanpa *lag*

Hasil analisis regresi sederhana tanpa *lag* yang digunakan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD_t) terhadap Belanja Daerah (BD_t) dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4.3

Pengaruh PAD_t terhadap BD_t

$BD_{2000} = 58298894,4 + 3,071$ PAD_{2000}	$BD_{2001} = 178417903 + 2,918$ PAD_{2001}	$BD_{2002} = 233533719 + 2,517$ PAD_{2002}
Sig = 0,000 t-statistic = 6,486	Sig = 0,000 t-statistic = 4,134	Sig = 0,000 t-statistic = 3,952
F-statistic = 42,064	F-statistic = 17,093	F-statistic = 15,618
$R (R^2) = 0,725 (0,525)$	$R (R^2) = 0,577 (0,310)$	$R (R^2) = 0,540 (0,291)$
Adjusted- $R^2 = 0,513$	Adjusted- $R^2 = 0,292$	Adjusted- $R^2 = 0,273$

Dari nilai *t-statistic* yang terlihat pada tabel diatas untuk ketiga regresi tersebut tampak bahwa PAD_t berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Daerah (BD_t) hal ini ditunjukkan dengan nilai *t-statistic* sebesar 6,486 untuk tahun 2000, 4,134 untuk tahun 2001 dan 3,952 untuk tahun 2002. Nilai *R* yang positif yang menunjukkan hubungan yang positif diantara kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan PAD ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu 52,5% untuk tahun 2000, 31% untuk tahun 2001 dan 29,1% untuk tahun 2002. Hal ini bermakna bahwa jika terjadi kenaikan PAD sebesar 10% maka BD akan naik sebesar 5,25% untuk tahun 2000, 3,1% untuk tahun 2001 dan 2,91% untuk tahun 2002. Dengan demikian hipotesis pertama dari hipotesis kedua (H_{2a}) yang menyatakan bahwa PAD_t berpengaruh positif terhadap BD_t tidak dapat ditolak, hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1994), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003).

b. Regresi sederhana dengan lag 1 tahun

Hasil analisis regresi sederhana dengan lag 1 tahun untuk mendeteksi adanya pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 4.4
Pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t

$BD_{2001} = 181512290 + 5,094 PAD_{2000}$	$BD_{2002} = 228025085 + 3,065 PAD_{2001}$
Sig = 0,000 t-statistic = 4,311	Sig = 0,000 t-statistic = 3,912
F- statistic = 18,518	F-statistic = 15,306
R (R^2) = 0,573 (0,328)	R (R^2) = 0,536 (0,287)
Adjusted- R^2 = 0,311	Adjusted- R^2 = 0,268

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai *t-statistic* untuk regresi sederhana dengan lag 1 tahun adalah 4,311 untuk regresi sederhana antara PAD tahun 2000 terhadap BD tahun 2001 dan 3,912 untuk regresi antara PAD tahun 2001 terhadap BD tahun 2002. Nilai *R* yang positif yang menunjukkan hubungan yang positif diantara kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan PAD_{t-1} ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu 32,8% untuk tahun 2000 dan 28,7% untuk tahun 2002., dengan demikian hipotesis kedua dari hipotesis yang kedua (H_{2b}) yang menyatakan bahwa PAD_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t tidak dapat ditolak. Hasil analisis ini memiliki arti bahwa jika terjadi kenaikan PAD_{t-1} sebesar 10% maka BD_t akan naik sebesar 3,28% untuk tahun 2001 dan 2,87% untuk tahun 2002 dan 7,41%. Hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1994), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003).

Hasil dari kedua regresi sederhana tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap BD terus mengalami penurunan dari tahun ketahun, ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah dalam jangka panjang PAD akan terus memberikan pengaruh terhadap BD.

4.2. Analisis Hasil Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

Pengujian dengan regresi berganda (*Multiple regression*) digunakan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya perubahan jumlah DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) secara serempak. Seperti halnya pada pengujian dengan regresi sederhana, pada pengujian regresi berganda ini juga akan digunakan dua langkah yaitu regresi berganda tanpa *lag* dan regresi berganda dengan menggunakan *lag* 1 tahun.

a. Regresi berganda pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) tanpa *lag*.

Hasil regresi berganda tanpa *lag* untuk mendeteksi adanya pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap Belanja Daerah (BD_t) dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4.5

Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t

$BD_{2000} = 1452275,534 + 1,044 DAU_{2000} + 1,341 PAD_{2000}$	$BD_{2001} = 25765665,4 + 0,814 DAU_{2001} + 2,105 PAD_{2001}$
Sig = 0,000 t-statistic = 33,490 13,399	Sig = 0,000 t-statistic = 9,285 5,239
F-statistic = 1202,022	F-statistic = 70,816
R (R^2) = 0,992 (0,984)	R (R^2) = 0,890 (0,792)
Adjusted- R^2 = 0,984	Adjusted- R^2 = 0,782
$BD_{2002} = 17029394,0 + 1,026 DAU_{2002} + 1,678 PAD_{2002}$	
Sig = 0,000 t-statistic = 12,442 5,758	
F-statistic = 116,823	
R (R^2) = 0,929 (0,563)	
Adjusted- R^2 = 0,856	

Hasil analisis regresi berganda yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif perubahan DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t yang ditunjukkan dengan nilai *t-statistic* dari masing-masing variabel bebas yaitu sebesar 33,490 untuk DAU tahun 2000, 13,399 untuk PAD tahun 2000, sedangkan untuk tahun 2001 nilai *t-statistic* untuk DAU adalah sebesar 9,285 dan 5,239 untuk PAD . Untuk tahun 2002, nilai *t-statistic* untuk DAU adalah 12,442 dan nilai *t-statistic* PAD nya adalah 5,758. Nilai *F-statistic* sebesar 1202,022, 70,816 dan 116,823 untuk tahun 2000, 2001, dan 2002. Nilai *R* yang positif yang menunjukkan hubungan yang positif diantara kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan DAU dan PAD ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu 98,4% untuk tahun 2000, 79,2% untuk tahun 2001 dan 56,3% untuk tahun 2002. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan sebesar 10% pada DAU_t dan PAD_t maka akan terjadi kenaikan pada BD_t sebesar 9,84% untuk tahun 2000, 7,92% untuk tahun 2001 dan 5,63% untuk tahun 2002., hasil ini

konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003) dan mendukung adanya hipotesis pendapatan-belanja.

b. Regresi berganda pengaruh DAU dan PAD terhadap BD dengan lag 1 tahun.

TABEL 4.6

Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t

$BD_{2001} = 47915997,9 + 2,453 DAU_{2000} + 1,029PAD_{2000}$	$BD_{2002} = 60112422,9 + 0,896 DAU_{2001} + 2,170 PAD_{2001}$
Sig = 0,58 t-statistic = 14,982 1,956	Sig = 0,000 t-statistic = 9,018 4,769
F-statistic = 176,166	F-statistic = 64,488
R (R ²) = 0,951 (0,904)	R (R ²) = 0,882 (0,778)
Adjusted-R ² = 0,900	Adjusted-R ² = 0,765

Hasil analisis regresi berganda yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif perubahan DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t yang ditunjukkan dengan nilai *t-statistic* dari masing-masing variabel bebas yaitu sebesar 9,018 untuk DAU tahun 2001, 4,769 untuk PAD tahun 2001. Nilai *F-statistic* sebesar 64,488 dan nilai *R* yang positif yang menunjukkan hubungan yang positif diantara kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} ditunjukkan oleh nilai *R*² yaitu sebesar 77,8%. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan sebesar 10% pada DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} maka akan terjadi kenaikan pada BD_t sebesar 7,78% hal ini mendukung adanya hipotesis pendapatan-belanja dan juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003).

Untuk tahun 2001 nilai *t-statistic* untuk DAU tahun 2000 adalah sebesar 14,982 dan 1,956 untuk PAD tahun 2000, tetapi Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka hasil regresi untuk DAU dan PAD tahun 2000 terhadap BD tahun 2001 tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kenaikan yang sangat tinggi pada jumlah DAU dari tahun 2000 ke tahun 2001 sehingga pada saat diregres secara bersamaan perubahan PAD tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah hal ini sesuai dengan data yang ada pada BPS yang menyebutkan bahwa kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah mengalami penurunan yaitu dari 9,02% pada tahun 2000 turun menjadi 6,59% pada tahun 2001 walaupun nilai nominalnya mengalami kenaikan.

4.3. Pengujian Terhadap *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah *transfer* dari pemerintah pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD. Dalam regresi tunggal, koefisien regresi, nilai *t-statistic*, *F-statistic*, R , R^2 , dan *adjusted-R²* masing-masing variable (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD. Apabila efek yang ditimbulkan oleh perubahan DAU terhadap Belanja

Daerah (BD) lebih besar dari pada efek yang ditimbulkan PAD terhadap BD maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Perbandingan dari masing-masing variable (regresi) dari masing-masing tahun untuk regresi sederhana tanpa *lag* dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4.7

Perbandingan pengaruh DAU_t dengan PAD_t terhadap BD_t

DAU_t	PAD_t	
$BD_{2000} = 39263,915 + 1,259 DAU_{2000}$	$BD_{2000} = 58298894,4 + 3,071 PAD_{2000}$	
Sig = 0,000 t-statistic = 19,758	Sig = 0,000 t-statistic = 6,486	A > B
F-statistic = 390,395	F-statistic = 42,064	A > B
R (R^2) = 0,955 (0,912)	R (R^2) = 0,725 (0,525)	A > B
Adjusted- R^2 = 0,909	Adjusted- R^2 = 0,513	A > B

DAU_t	PAD_t	
$BD_{2001} = 45776537,2 + 0,915 DAU_{2001}$	$BD_{2001} = 178417903 + 2,918 PAD_{2001}$	
Sig = 0,000 t-statistic = 8,205	Sig = 0,000 t-statistic = 4,134	A > B
F-statistic = 67,327	F-statistic = 17,093	A > B
R (R^2) = 0,800 (0,64)	R (R^2) = 0,577 (0,310)	A > B
Adjusted- R^2 = 0,630	Adjusted- R^2 = 0,292	A > B

DAU_t	PAD_t	
$BD_{2002} = 27810083,6 + 1,136 DAU_{2002}$	$BD_{2002} = 233533719 + 2,517 PAD_{2002}$	
Sig = 0,000 t-statistic = 10,421	Sig = 0,000 t-statistic = 3,952	A > B
F-statistic = 108,587	F-statistic = 15,618	A > B
R (R^2) = 0,561 (0,741)	R (R^2) = 0,540 (0,291)	A > B
Adjusted- R^2 = 0,734	Adjusted- R^2 = 0,273	A > B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *t-statistic*, *F-statistic*, *R*, R^2 , dan *adjusted-R²* masing-masing variabel (regresi) DAU lebih besar daripada PAD hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang disebabkan oleh perubahan DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh perubahan PAD terhadap BD, dan

menunjukkan keberadaan *flypaper effect* dan sekaligus menegaskan bahwa hipotesis pertama dari hipotesis ketiga (H_{3a}) tidak dapat ditolak.

Untuk hasil Perbandingan besarnya pengaruh DAU_{t-1} dengan PAD_{t-1} terhadap BD_t yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang kedua dari hipotesis yang ketiga (H_{3b}) dapat dilihat dalam tabel 4.6 .

TABEL 4.8

Perbandingan pengaruh DAU_{t-1} dengan PAD_{t-1} terhadap BD_t

DAU _{t-1}	PAD _{t-1}	
$BD_{2001} = 46832269,1 + 2,619 DAU_{2000}$	$BD_{2001} = 181512290 + 5,094 PAD_{2000}$	
Sig = 0,000 t-statistic = 18,010	Sig = 0,000 t-statistic = 4,311	A > B
F-statistic = 324,373	F-statistic = 18,518	A > B
R (R ²) = 0,946 (0,894)	R (R ²) = 0,573 (0,328)	A > B
Adjusted-R ² = 0892	Adjusted-R ² = 0,311	A > B

DAU _{t-1}	PAD _{t-1}	
$BD_{2002} = 80743812 + 0,999 DAU_{2001}$	$BD_{2002} = 228025085 + 3,065 PAD_{2001}$	
Sig = 0,000 t-statistic = 8,220	Sig = 0,000 t-statistic = 3,912	A > B
F-statistic = 67,566	F-statistic = 15,306	A > B
R (R ²) = 0,800 (0,64)	R (R ²) = 0,536 (0,287)	A > B
Adjusted-R ² = 0,630	Adjusted-R ² = 0,268	A > B

Hasil perbandingan pada tabel diatas menunjukkan hasil yang sama dengan perbandingan pada regresi tanpa *lag*, hasil ini juga mendukung pendapat yang menyatakan bahwa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)_{t-1} terhadap Belanja Daerah (BD)_t lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)_{t-1} terhadap Belanja Daerah (BD)_t yang berarti bahwa H_{3b} juga tidak dapat ditolak. hasil ini konsisten dengan pandangan Gamkhar & Oates (1996), Analisis Zou (1994), Legrensi dan Milas (2001), Zampelli (1986). hasil ini juga konsisten

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2003)..

Dari hasil regresi diatas baik menggunakan regresi sederhana tanpa *lag* maupun dengan *lag* dapat dilihat bahwa DAU dan PAD benar-benar memberikan pengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) bahkan pada saat DAU dan PAD diregres secara serempak hasilnya juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) dan dari hasil perbandingan yang menunjukkan bahwa nilai *t-statistic*, *F-statistik*, *R*, R^2 , dan *adjusted-R²* masing-masing variable (regresi) dari DAU yang lebih besar dari PAD terlihat bahwa pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD dan memberikan bukti tentang keberadaan *flypaper effect*, hasil ini menunjukkan bahwa walaupun Otonomi Daerah sudah dilaksanakan di Indonesia, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah sebenarnya belum memiliki kesiapan yang cukup untuk melaksanakan salah satu tuntutan reformasi tersebut ini terbukti dengan besarnya pengaruh *transfer* dari Pemerintah Pusat yang lebih besar dari pada pengaruh pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sendiri, hal ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan kriteria tingkat kemandirian pembiayaan menurut Kuncoro (1995), bahwa kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dengan dua kriteria yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran atas penelitian pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah (BD) yang menggunakan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah sebagai sampel penelitian.

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu regresi sederhana (*simple regression*) untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terpisah terhadap Belanja Pemerintah Daerah (BD) baik dengan maupun tanpa *lag*, dan regresi berganda (*multiple regression*) untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD secara serempak baik dengan maupun tanpa *lag*.

Hasil analisis yang dilakukan dengan alat-alat uji diatas menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara perubahan DAU dan PAD terhadap perubahan Belanja Daerah baik pada saat dilakukan regresi sederhana (dengan atau tanpa *lag*) maupun dengan regresi berganda (dengan atau tanpa *lag*) hampir semua pengujian menunjukkan hubungan yang signifikan positif, yang bermakna bahwa apabila terjadi peningkatan pada DAU dan PAD maka akan diikuti peningkatan pada Belanja Daerah. Pada saat hasil dari masing-masing pengujian itu dibandingkan satu sama lain, terlihat bahwa nilai *t-statistic*, *F-statistik*, *R*, R^2 ,

dan *adjusted-R²* pada masing-masing variable (regresi), DAU memiliki nilai yang lebih besar daripada PAD, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah terhadap besarnya Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh perubahan jumlah PAD terhadap Belanja Daerah (BD), dari hasil ini juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah belum memiliki kesiapan yang matang untuk menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan pada penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini hanya menggunakan sampel kabupaten/kota pada provinsi DIY dan Jawa Tengah sehingga tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk membuat inferensi untuk kasus diprovinsi lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data untuk tiga tahun (2000, 2001, 2002) sehingga belum dapat dilakukan analisis yang lebih komprehensif untuk itu pada penelitian-penelitian sesudahnya perlu adanya penambahan data baik untuk jumlah kurun waktu maupun untuk jumlah kabupaten/kota.

5.3. Saran

Berdasarkan pembahasan, analisis hasil dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut.

- a. Melihat adanya pengaruh perubahan DAU yang sangat signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) maka pemerintah pusat perlu memperbaiki formulasi DAU sehingga jumlah DAU yang diberikan pada pemerintah kabupaten/kota benar-benar memenuhi kebutuhan pemerintah daerah tersebut, selain itu Pemerintah Pusat juga perlu dan harus menyampaikan APBN dan Kepres tentang DAU jauh sebelum tahun berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik.
- b. Karena PAD juga memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, maka pemerintah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga kemampuan daerah dalam memenuhi APBDnya akan meningkat dengan begitu maka pemerintah daerah akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.
- c. Bagi penelitian berikutnya perlu dilakukan penelitian dengan memperbanyak sampel dan memperpanjang kurun waktu sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal, selain itu juga perlu diperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek psikologis dan personalitas pembuat keputusan atau mungkin juga mempertimbangkan fakto-faktor yang menyebabkan perubahan pada DAU dan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2001*, <http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id/08-dana.htm>.
- _____, *Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2002*, <http://www.geocities.com/aripsda/DAU/data/DAU2002.pdf>.
- _____, *Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2002*, <http://www.ri.go.id/produk-uu/produk2003/kp2003/kp103+lamp.htm>.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, SNA IV, Surabaya 16-27 Oktober, 2003.
- Algifari, *Analisis Statistik untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi, dan Nonparametrik*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1997.
- _____, *Analisis Regresi Teori, Kasus, Dan Solusi*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1997.
- Badan Pusat Statistik Propinsi DIY, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002*, BPS, Jakarta.
- Halim, Abdul, *Anggaran Daerah Dan "Fiscal stress" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi Di Indonesia)*, *Jurnal Ekonomi Indonesia* 16 (4), 346-357, 2001.
- Haryadi, Bambang, *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Provinsi Jawa Timur)*, Simposium Nasional Akuntansi V, 2002.
- Kustiawan, Memen, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional*, Komisi C Simposium Nasional Akuntansi IV, 2001.
- Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.60, *Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 72, *Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Memesan, D.J, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro, *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Solikhin, Dadang dan Dedy Supriyadi Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

LAMPIRAN

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU ^a (2000)		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2000)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 ^a	.911	.909	9825552.554

a. Predictors: (Constant), DAU (2000)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.76893E+16	1	3.769E+16	390.395	.000 ^a
	Residual	3.66858E+15	38	9.654E+13		
	Total	4.13579E+16	39			

a. Predictors: (Constant), DAU (2000)

b. Dependent Variable: BD (2000)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39263.915	4834835.380		.008	.994
	DAU (2000)	1.259	.064	.955	19.758	.000

a. Dependent Variable: BD (2000)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU ^a (2001)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2001)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.639	.630	41571842.60

a. Predictors: (Constant), DAU (2001)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.16356E+17	1	1.164E+17	67.327	.000 ^a
	Residual	6.56723E+16	38	1.728E+15		
	Total	1.82028E+17	39			

a. Predictors: (Constant), DAU (2001)

b. Dependent Variable: BD (2001)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	45776537.2	23970887.8		1.910	.064
	DAU (2001)	.915	.111	.800	8.205	.000

a. Dependent Variable: BD (2001)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU ^a (2002)		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2002)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 ^a	.741	.734	38470593.02

a. Predictors: (Constant), DAU (2002)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.60708E+17	1	1.607E+17	108.587	.000 ^a
	Residual	5.62395E+16	38	1.480E+15		
	Total	2.16947E+17	39			

a. Predictors: (Constant), DAU (2002)

b. Dependent Variable: BD (2002)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27810083.6	25640677.2		1.085	.285
	DAU (2002)	1.136	.109	.861	10.421	.000

a. Dependent Variable: BD (2002)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (2000) ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2000)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.525	.513	22727908.56

a. Predictors: (Constant), PAD (2000)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.17287E+16	1	2.173E+16	42.064	.000 ^a
	Residual	1.96292E+16	38	5.166E+14		
	Total	4.13579E+16	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2000)

b. Dependent Variable: BD (2000)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58298894.4	6129235.211		9.512	.000
	PAD (2000)	3.071	.474	.725	6.486	.000

a. Dependent Variable: BD (2000)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD ^a (2001)		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2001)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557 ^a	.310	.292	57480338.60

a. Predictors: (Constant), PAD (2001)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.64767E+16	1	5.648E+16	17.093	.000 ^a
	Residual	1.25552E+17	38	3.304E+15		
	Total	1.82028E+17	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2001)

b. Dependent Variable: BD (2001)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	178417903	16413578.9		10.870	.000
	PAD (2001)	2.918	.706	.557	4.134	.000

a. Dependent Variable: BD (2001)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (2002) ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2002)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.291	.273	63609396.03

a. Predictors: (Constant), PAD (2002)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.31935E+16	1	6.319E+16	15.618	.000 ^a
	Residual	1.53754E+17	38	4.046E+15		
	Total	2.16947E+17	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2002)

b. Dependent Variable: BD (2002)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	233533719	16933526.1		13.791	.000
	PAD (2002)	2.517	.637	.540	3.952	.000

a. Dependent Variable: BD (2002)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU ^a (2000)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2001)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.946 ^a	.895	.892	22412547.85

a. Predictors: (Constant), DAU (2000)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.62940E+17	1	1.629E+17	324.373	.000 ^a
	Residual	1.90882E+16	38	5.023E+14		
	Total	1.82028E+17	39			

a. Predictors: (Constant), DAU (2000)

b. Dependent Variable: BD (2001)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46832269.1	11028487.1		4.246	.000
	DAU (2000)	2.619	.145	.946	18.010	.000

a. Dependent Variable: BD (2001)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD ^a (2000)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2001)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.573 ^a	.328	.311	56719509.96

a. Predictors: (Constant), PAD (2000)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.97784E+16	1	5.978E+16	18.581	.000 ^a
	Residual	1.22250E+17	38	3.217E+15		
	Total	1.82028E+17	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2000)

b. Dependent Variable: BD (2001)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	181512290	15296049.6		11.867	.000
	PAD (2000)	5.094	1.182	.573	4.311	.000

a. Dependent Variable: BD (2001)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU ^a (2001)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2002)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.640	.631	45333082.63

a. Predictors: (Constant), DAU (2001)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.38854E+17	1	1.389E+17	67.566	.000 ^a
	Residual	7.80934E+16	38	2.055E+15		
	Total	2.16947E+17	39			

a. Predictors: (Constant), DAU (2001)

b. Dependent Variable: BD (2002)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80743812.1	26139669.8		3.089	.004
	DAU (2001)	.999	.122	.800	8.220	.000

a. Dependent Variable: BD (2002)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD ^a (2001)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2002)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.536 ^a	.287	.268	63795159.81

a. Predictors: (Constant), PAD (2001)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.22942E+16	1	6.229E+16	15.306	.000 ^a
	Residual	1.54653E+17	38	4.070E+15		
	Total	2.16947E+17	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2001)

b. Dependent Variable: BD (2002)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	228025085	18216783.6		12.517	.000
	PAD (2001)	3.065	.783	.536	3.912	.000

a. Dependent Variable: BD (2002)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (2000), DAU ^a (2000)		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2000)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.985	.984	4116153.382

a. Predictors: (Constant), PAD (2000), DAU (2000)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.07310E+16	2	2.037E+16	1202.022	.000 ^a
	Residual	6.26881E+14	37	1.694E+13		
	Total	4.13579E+16	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2000), DAU (2000)

b. Dependent Variable: BD (2000)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	452276.534	2028169.019		.716	.478
	DAU (2000)	1.044	.031	.791	33.490	.000
	PAD (2000)	1.341	.100	.317	13.399	.000

a. Dependent Variable: BD (2000)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (2001), DAU ^a (2001)		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: BD (2001)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.793	.782	31921915.02

- a. Predictors: (Constant), PAD (2001), DAU (2001)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.44325E+17	2	7.216E+16	70.816	.000 ^a
	Residual	3.77033E+16	37	1.019E+15		
	Total	1.82028E+17	39			

- a. Predictors: (Constant), PAD (2001), DAU (2001)
b. Dependent Variable: BD (2001)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25765665.4	18798737.1		1.371	.179
	DAU (2001)	.814	.088	.712	9.285	.000
	PAD (2001)	2.105	.402	.402	5.239	.000

- a. Dependent Variable: BD (2001)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (2002), DAU (2002) ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2002)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929 ^a	.863	.856	28312331.89

a. Predictors: (Constant), PAD (2002), DAU (2002)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.87289E+17	2	9.364E+16	116.823	.000 ^a
	Residual	2.96588E+16	37	8.016E+14		
	Total	2.16947E+17	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2002), DAU (2002)

b. Dependent Variable: BD (2002)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17029394.0	18962830.7		.898	.375
	DAU (2002)	1.026	.082	.777	12.442	.000
	PAD (2002)	1.678	.291	.360	5.758	.000

a. Dependent Variable: BD (2002)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (2000), DAU (2000) ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2001)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.951 ^a	.905	.900	21622699.77

a. Predictors: (Constant), PAD (2000), DAU (2000)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.64729E+17	2	8.236E+16	176.166	.000 ^a
	Residual	1.72990E+16	37	4.675E+14		
	Total	1.82028E+17	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2000), DAU (2000)

b. Dependent Variable: BD (2001)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47915997.9	10654240.9		4.497	.000
	DAU (2000)	2.453	.164	.886	14.982	.000
	PAD (2000)	1.029	.526	.116	1.956	.058

a. Dependent Variable: BD (2001)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (2001), DAU (2001) ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD (2002)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.777	.765	36153919.17

a. Predictors: (Constant), PAD (2001), DAU (2001)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.68585E+17	2	8.429E+16	64.488	.000 ^a
	Residual	4.83629E+16	37	1.307E+15		
	Total	2.16947E+17	39			

a. Predictors: (Constant), PAD (2001), DAU (2001)

b. Dependent Variable: BD (2002)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	60112422.9	21290953.9		2.823	.008
	DAU (2001)	.896	.099	.717	9.018	.000
	PAD (2001)	2.170	.455	.379	4.769	.000

a. Dependent Variable: BD (2002)